

# **SKRIPSI**

## **EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKEP**

**NURLINDAH SULDAR**

**E011171015**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### ABSTRAK

**Nurlindah Suldar (E011171015). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Pembimbing I: Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si dan Pembimbing II: Drs. Nelman Edi M.Si**

Penelitian ini berfokus pada analisis “ Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Teori efektivitas menggunakan teori Duncan (Steers, 1985:53), meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep dengan jumlah 32 orang dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menyebarkan kuisisioner. Analisis data dilakukan melalui pengujian statistik menggunakan program SPSS versi 23. Besarnya persentase efektivitas untuk indikator pencapaian tujuan sebesar 80,20%, indikator integrasi 80,20% dan indikator adaptasi sebesar 77,43%. Saran dari peneliti adalah perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai penerapan SIAK kepada publik maupun instansi pemerintahan agar data atau informasi dalam SIAK mampu dimanfaatkan dalam pembuatan sebuah kebijakan dan perlu adanya pemaksimalan dalam penyediaan fasilitas mengenai perangkat yang digunakan guna menunjang penerapan SIAK.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### **ABSTRACT**

***Nurlindah Suldar (E011171015). Effectiveness of Implementation Population Administration Information System in Population and Civil Registration Agency Pangkep Regency. Counselor I: Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si and Counselor II: Drs. Nelman Edi M.Si***

*This study focuses on the Effectiveness of Implementation Population Administration Information System in Population and Civil Registration Agency Pangkep Regency. The purpose of this research is to know how much the effectiveness of including achievement of goals, integration and adaptation of SIAK in Population and Civil Registration Agency Pangkep Regency. The theory of effectiveness uses Duncan's theory (Steers, 1985: 53), including achievement of goals, integration and adaptation. The research method uses quantitative method. The research population are the employees in Population and Civil Registration Agency Pangkep Regency of 32 people with saturated sampling technique. The technique used for gathering data is by questionnaire. Data analysis was carried out through statistical testing using the SPSS Version 23. The percentage of the effectiveness for including achievement of goals indicator is 80,20%, integration 80,20% and adaptation 77,43%. The suggestion from researchers is need for increased socialization regarding the application of SIAK to the public and government agencies so that data or information in SIAK can be used in making a policy and need for maximization in the provision of facilities regarding the tools used to support the implementation of SIAK.*

**Keywords:** *Effectiveness, Population Administration Information System*



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURLINDAH SULDAR

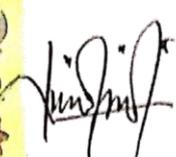
NIM : E011171015

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep" merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 31 Mei 2021



  
Nuriindah Suldar  
E011171015



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : NURLINDAH SULDAR

NIM : E011171015

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Mei 2021

Pembimbing I,

Menyetujui,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si  
NIP. 19570507 198403 1 002

Drs. Nelman Edy M.Si  
NIP. 19761023 200501 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP. 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURLINDAH SULDAR

NIM : E011171015

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa Tanggal 28 Mei 2021

Makassar, 31 Mei 2021

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si

Sekretaris Sidang : Drs. Nelman Edy M.Si

Anggota : 1. Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

2. Irma Aryanti Arif, S.Sos., M.Si

()

()

()

()

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat rahmat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan tarima kasih yang mendalam kepada orang tua, **Sultan** dan **Darmawati**, terima kasih atas doa yang tiada hentinya, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan dukungan yang terus diberikan kepada penulis sampai saat ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku **Nasrah, Syamsu Alam Suldar, Hariyati Suldar, Muh. Yusuf Suldar, Muh. Amin Suldar, Sri Ramadani Suldar, Putri Maulidah dan Muh. Nuzulul Ramadhan** atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.sos, MAP** selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Drs. Nelman Edy M.Si** selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya memberikan masukan, saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.** dan **Irma Aryanti Arif, S.Sos., M.Si.** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin,** terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan penulis sebaik mungkin.
8. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (**Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili**), terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Terima kasih kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada keluarga besar **Humanis Fisip Unhas** dan **UKM Renang Unhas** yang telah memberikan wadah bagi penulis dalam berorganisasi dan terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan **LEADER 2017** atas segala bantuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga cita-cita kita bersama dapat tercapai.
12. Terima kasih kepada **Widy Claudy Hakim, Muhammad Fathir Hasyim, Ibnu Hajar, Fitri Ramadhani** yang telah menyemangati, menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima kasih kepada **Nur Wulandari, Nismawati, Dewi Tasik Bone, Dian Anugrah Laide, Nur Azmy, Nur Fitri** dan **Elena** yang telah membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Makassar, 13 April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	6
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Deskripsi Teori.....	8
II.1.1 Konsep Efektivitas.....	8
II.1.1.1 Pengertian Efektivitas .....	8
II.1.1.2 Tolak Ukur Efektivitas .....	10
II.1.2 Konsep Sistem Informasi.....	15
II.1.3 Konsep Sistem Informasi Manajemen.....	19
II.1.4 Konsep Administrasi Kependudukan .....	24
II.1.5 Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) .....	27
II.1.5.1 Pengertian SI AK .....	27
II.1.5.2 Komponen Penting dalam Pengimplementasian SI AK .....	27

II.1.5.3 Unsur-unsur SIAK .....	28
II.1.5.4 Pengelolaan dan Tujuan SIAK .....	29
II.2 Kerangka Pikir.....	31
II.3 Hipotesis Penelitian.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Metode Penelitian .....	34
III.2 Lokasi Penelitian .....	34
III.3 Populasi dan Sampel .....	35
III.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
III.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	36
III.6 Instrumen Penelitian .....	37
III.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	40

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkep .....	41
IV.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.....	42
IV.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep .....	42
IV.2.2 Struktur Organisasi Didinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.....	43

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1 Karakteristik Responden.....	56
V.2 Uji Instrumen Penelitian .....	59
V.2.1 Uji Validitas .....	59
V.2.2 Uji Reliabilitas .....	61
V.3 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas SIAK.....	61
V.3.1 Pencapaian Tujuan .....	62
V.3.2 Integrasi .....	72
V.3.2 Adaptasi .....	78
V.4 Analisis Data.....	93
V.5 Pembahasan .....	95

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

VI.1 Kesimpulan..... 99

VI.2 Saran-saran..... 99

**DAFTAR PUSTAKA..... 101**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian .....	37
Tabel 3.2 Skor dalam Penelitian .....	38
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas Instrumen.....	60
Tabel 5.2 Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas SIAK.....	61
Tabel 5.3 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas SIAK Untuk Indikator Pencapaian Tujuan .....	88
Tabel 5.4 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas SIAK Untuk Indikator Integrasi .....	89
Tabel 5.5 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas SIAK Untuk Indikator Adaptasi .....	90
Tabel 5.5 Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	93
Tabel 5.7 Nilai Efektivitas Penerapan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep Untuk Tiap Indikator Teori Efektivitas Menurut Duncan .....	96

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sebuah sistem informasi sederhana .....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	45

## DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	56
Diagram 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Diagram 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Diagram 5.4 Tanggapan Responden Tentang Tercapainya Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil . .....	63
Diagram 5.5 Tanggapan Responden Tentang Penyajian Data dan Informasi Melalui SIAK dapat Mempermudah Pihak Birokrasi.....	64
Diagram 5.6 Tanggapan Responden Tentang Manfaat Atau Tujuan Dari SIAK Yakni Tertib Administrasi.....	65
Diagram 5.7 Tanggapan Responden Tentang SIAK Mampu Menghemat Pengeluaran.....	66
Diagram 5.8 Tanggapan Responden Tentang Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....	67
Diagram 5.9 Tanggapan Responden Tentang SIAK Mengurangi Waktu Penyelesaian Suatu Pekerjaan.....	68
Diagram 5.10 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dapat Dilakukan Dengan Cepat .....	69
Diagram 5.11 Tanggapan Responden Tentang SIAK Mampu Menyelesaikan Tugas Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditetapkan .....	70
Diagram 5.12 Tanggapan Responden Tentang Minimnya Keluhan Masyarakat Mengenai Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	71
Diagram 5.13 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Mengenai SIAK . .....	72

Diagram 5.14 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Kepada Instansi Lain Dalam Pemanfaatan SIAK .....	73
Diagram 5.15 Tanggapan Responden Tentang Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mendaftarkan Peristiwa Kependudukan...	74
Diagram 5.16 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku.....	75
Diagram 5.17 Tanggapan Responden Tentang Petugas Menginput Data Penduduk Secara Lengkap ke Dalam SIAK .....	76
Diagram 5.18 Tanggapan Responden Tentang Adanya Buku Petunjuk Atau Panduan Dalam Penggunaan SIAK .....	77
Diagram 5.19 Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Pegawai yang Memadai Dalam Pengetikan Data Kependudukan Sesuai Dengan Hasil Pendaftaran Penduduk Menggunakan SIAK .....	78
Diagram 5.20 Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Pegawai Yang Memadai Dalam Pengetikan Data Kependudukan Sesuai Dengan Hasil Pencatatan Sipil Menggunakan SIAK.....	79
Diagram 5.21 Tanggapan Responden Tentang SIAK Mudah Dipahami Penggunaannya Oleh Pegawai.....	80
Diagram 5.22 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Mudah Untuk Mengoperasikan SIAK .....	81
Diagram 5.23 Tanggapan Responden Tentang Perangkat Komputer Yang Digunakan Sudah Sesuai Dengan Standar .....	82
Diagram 5.24 Tanggapan Responden Tentang Perangkat Pendukung Yang Memadai Dalam Penerapan SIAK.....	83

Diagram 5.25 Tanggapan Responden Tentang Adanya Perbaikan Atau Penggantian Alat Ketika Terjadi Kerusakan Pada Salah Satu Perangkat Pada sistem .....	84
Diagram 5.26 Tanggapan Responden Tentang SIAK Memiliki Tingkat Keamanan Yang Tinggi.....	85
Diagram 5.27 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Merasa Nyaman Menggunakan Sistem Yang Ada .....	86

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat-Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Kuisisioner

Lampiran 4 Tabulasi Data Ordinal Sebelum Uji Validitas

Lampiran 5 Tabulasi Data Ordinal Setelah Uji Validitas

Lampiran 6 Uji Validitas

Lampiran 7 Uji Reliabilitas

Lampiran 8 Data Indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi

Lampiran 9 Statistik Deskriptif tanggapan responden

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, dimana dengan hadirnya teknologi tersebut berbagai masalah dapat diselesaikan. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam aktifitas manusia dimana dunia saat ini seakan-akan tanpa batas dan jarak tidak lagi menjadi penghalang setiap individu untuk memperoleh informasi. Setiap individu dapat dengan mudah mengakses informasi yang tersebar di internet. Tak hanya itu, informasi juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai organisasi baik negara maupun bisnis guna membuat sebuah kebijakan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menyusun berbagai strategi dalam pencapaian tujuan melalui pemanfaatan informasi tersebut.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar di dunia dan juga merupakan negara kepulauan, Indonesia memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Berbagai masalah yang kerap terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang dengan persebaran yang tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah harus sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan yang bersifat solutif terhadap permasalahan yang terjadi.

Terkait dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan perlindungan atas data pribadi yang menjadi hak-hak tiap penduduk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik

pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, memberikan perlindungan dan pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (SIAK) yang dibuat guna mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat terkait administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebelum penerapan SIAK dilaksanakan, mulanya pendataan kependudukan dan pencatatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang mulai diterapkan pada tahun 1996. SIMDUK merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan di kabupaten/kota untuk mengolah data kependudukan dengan menggunakan sistem komputerisasi serta ditujukan untuk menangani status kependudukan dan segala perubahannya. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan dikarenakan NIK pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK tersebut berpindah domisili. Hal ini karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di kecamatan, bukan nomor induk tingkat kabupaten/kota serta adanya potensi pemalsuan identitas karena kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai upaya untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran penduduk sesuai standar yang diperlukan dalam mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan diatur dalam Keputusan Presiden No. 88 tahun 2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_informasi\\_administrasi\\_kependudukan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan)). Peraturan terbaru mengenai administrasi kependudukan yakni diatur dalam Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana dalam Permendagri No. 95 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 95 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap dan mutakhir
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dan tetap menjamin kerahasiaan data.

Data yang akurat dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tersebut digunakan pemerintah untuk implementasi kebijakan pemerintah seperti pendataan statistik, menentukan daftar pemilih tetap untuk pemilihan

umum, sebagai acuan pemberian bantuan langsung tunai serta sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota merupakan pihak yang berperan penting dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan dalam urusan administrasi kependudukan. Begitu halnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa penting yang dimaksud adalah peristiwa yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Adapun aturan yang mengikat dalam menjalankan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yakni berdasar pada Perda Kabupaten Pangkep Nomor 03 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Pangkep. Melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tersebut, diharapkan mampu mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dapat memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pemerintahan. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan melalui jaringan komputerisasi dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan atau pembuatan KTP-*e*/, kartu keluarga maupun akta-akta catatan sipil sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yakni mengenai peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengurusan KTP-*e*/ yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dimana seharusnya sudah semakin sederhana, diupayakan semaksimal mungkin cepat

dan tidak berbelit-belit. Seperti yang dialami oleh salah satu warga di Kabupaten Pangkep yang mengaku kehilangan KTP dan harus menunggu dua tahun untuk mendapatkan KTP baru dimana disebabkan karena kelangkaan, kehabisan, atau tidak adanya blangko KTP yang tersedia di Disdukcapil Pangkep. (Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui website <https://www.simpulrakyat.co.id/2020/09/dilema-disdukcapil-pangkep-layani-antrian-e-ktp-warga.html>). Tak hanya itu beberapa kasus yang muncul yakni warga negara yang memiliki KTP ganda sebagaimana yang termuat dalam berita yang menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga ber-KTP ganda juga terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulsel. Namanya Abdul Rahman, lahir di Pangkep tetapi juga Abd Rahman, orang yang sama, lahir di Ujung Pandang. (Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui website <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-sebut-warga-ber-ktp-ganda-punya-niat-tidak-bagus.html>). Adapun masalah NIK yang tidak valid juga didapati di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut termuat dalam berita yang menyebutkan bahwa sebanyak 6.886 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Pangkep yang masuk tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinonaktifkan kepesertaannya, salah satunya karena NIK yang tidak valid. (<https://makassar.tribunnews.com/2019/08/07/6886-peserta-bpjs-kesehatan-pbi-di-pangkep-dinonaktifkan>). Dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), diharapkan dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya pada pengurusan akta kelahiran cukup lama, dimana masyarakat harus menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh akta kelahiran. (Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui website

<http://www.tempo.co/read/news/Pelayanan-Akta-Kelahiran>).

Dalam pengimplementasiannya terdapat sejumlah kendala yang membuat penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak begitu efektif antara lain keterbatasan infrastruktur yakni berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Tak hanya itu, kendala lain yakni berkenaan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan, pengoperasian dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas dari pencapaian tujuan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas dari integrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas dari adaptasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pencapaian tujuan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari integrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari adaptasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian dengan selanjutnya dengan bidang yang sama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan dan pertimbangan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Deskripsi Teori**

##### **II.1.1 Konsep Efektivitas**

###### **II.1.1.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas merupakan suatu konsep mengenai sejauh mana sebuah organisasi berhasil mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil terhadap suatu tujuan. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kemajuan yang diperoleh dalam pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi tersebut. Konsep efektivitas organisasi tergantung pada teori sistem dimana kriteria dari efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus *input-proses-output*. Tak hanya itu, kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dengan lingkungan luarnya menurut Ivancevich (2006:23). Kriteria utama efektivitas organisasi yakni bagaimana organisasi tersebut bertahan dalam lingkungannya terlebih dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi tersebut akan terbentuk, berkembang, matang dan akan menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga akan mempermudah dalam proses adaptasi organisasi tersebut.

Menurut Richard M. Steers (1985:6) bahwa efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Waluyo (2007:85) berpendapat bahwa efektivitas organisasi merupakan akhir (*ultimate criterion*) baik atau buruknya suatu manajemen. Tanpa adanya efektivitas, kesejahteraan organisasi dan kemauannya berada dalam bahaya.

Sedangkan menurut Miller (dalam Tangkilisan 2005:138) mengemukakan bahwa:

*“Effectiveness be define as the degree to which a social system achive its goals. Effectiveness must be distinguished from effiency. Effiency is mainly concerned with goal attainments”*

(efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan).

Selanjutnya adalah menurut Georgopualos dan Tannebaum (dalam Tangkilisan 2005:139)

*“...organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it's objective without incapacitating it's mean and resources ad without placing strain upon it's members.”*

(...efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.)

Efektivitas menyangkut dua aspek yakni tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perspektif efektivitas organisasi yang digunakan adalah perspektif tujuan, dimana tolak ukur yang digunakan adalah bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk merealisasikan visi dan misi dari organisasi tersebut.

Dari beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran mengenai seberapa jauh suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

#### **II.1.1.2 Tolak Ukur Efektivitas**

Efektivitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Pengukuran terhadap efektivitas bukanlah sesuatu yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan secara efektif.

Steers (1985:206) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1. Kemampuan adaptasi atau keluwesan
2. Produktivitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya

Sementara Gibson *et al* (dalam Tangkilisan 2005:141) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara lain:

1. Parulian Hutapea (2008:59) berpendapat bahwa efektivitas organisasi dapat dievaluasi dengan melihat dua hal yakni pencapaian sasaran dan proses pelaksanaan organisasi.
2. Robbins (1994:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konsituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi.

#### a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*).

Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan atas dasar tujuan tertentu. Dalam pendekatan tujuan ini, ketika organisasi itu telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan

tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan- tujuan tersebut harus dapat diukur (*measurable*).

b. Pendekatan Sistem (*The System Approach*)

Pada dasarnya organisasi bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (*input*), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (*output*). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena ukuran seperti itu tidaklah sempurna. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, dan menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem berfokus pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka panjang.

c. Pendekatan Konsituensi-Strategis (*The Strategic-Consituencies*)

Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konsituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut yakni konsituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem, tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konsituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan,

dan pelanggan. Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh *return on investment* yang tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*The Competing-Value Approach*)

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih *integrative* dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu : 1) fleksibilitas versus pengendalian, 2) manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan tiga perangkat dasar tersebut dapat digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu *human rational model*, *open system model*, *rational goal model* dan *internal process model*.

Keempat pendekatan diatas hanya dapat berjalan dengan baik ketika dijalankan dengan sebuah manajemen yang baik pula. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins bahwa fungsi-fungsi manajemen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, penegakan strategi dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Pengorganisasian mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan dimana

keputusan itu harus diambil. Karena itu dapat berjalan dengan baik, maka tentunya efektivitas organisasi akan tercipta.

Sedangkan menurut Ivancevich and Matteson (dalam Parulian Hutapea 2008:59), untuk mengukur efektivitas organisasi menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sasaran organisasi dan pendekatan sistem.

#### 1. Pendekatan Sasaran Organisasi

Para pendukung pendekatan ini berargumentasi bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai sasaran sehingga untuk melihat tingkat efektivitas suatu organisasi kita dapat menghubungkannya langsung dengan pencapaian sasaran dari organisasi itu sendiri.

#### 2. Pendekatan Sistem

Berbeda dengan pendekatan sasaran, pendekatan sistem tidak melihat efektivitas organisasi atas dasar hasil atau sasaran yang dicapai, melainkan dari gambaran organisasi mulai dari bentuk *input*, proses dan *output*. Tak hanya itu pendekatan sistem juga menggambarkan perilaku organisasi baik pada saat interaksi secara internal di organisasi maupun organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### **II.1.2 Konsep Sistem Informasi**

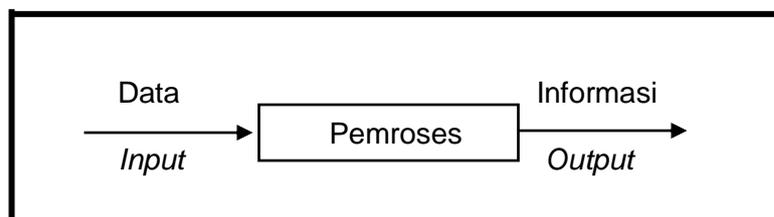
Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tata Sutabri 2012:46).

Menurut John F. Nash (dalam Djahir 2014:14) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Sementara Lucas (dalam Kumorotomo 2017:14) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi.

Semua sistem informasi memiliki tiga kegiatan utama, yaitu : mereka menerima data sebagai masukan (*input*); kemudian memprosesnya dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran akun (*updating account*), dan lain-lainnya hingga akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarannya (*output*). Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanis, maupun komputer. Ketiga fungsi ini tergambar pada sebuah sistem informasi sederhana dalam gambar 2.1 di bawah ini :

**Gambar 2.1 Sebuah Sistem Informasi Sederhana**



Sistem Informasi Sederhana (Scott 2002:69)

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan dimana terdiri dari enam macam blok yakni blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data dan blok kendali. Keenam blok

tersebut saling berinteraksi satu sama lain membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang pendapat dari Tata Sutabri (2012: 47) dijelaskan sebagai berikut.

1. Blok masukan (*input block*), *input* yang mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi yakni dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
2. Blok model (*model block*), blok akan memanipulasi data input yang tersimpan di basis data untuk menghasilkan sebuah keluaran.
3. Blok keluaran (*output block*), produk dari sistem informasi merupakan informasi yang berkualitas.
4. Blok teknologi (*technology block*), teknologi merupakan *tool box* dalam sistem informasi. Teknologi terdiri dari tiga bagian utama yakni teknisi (*brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*). Blok teknologi ini digunakan untuk menerima *input*, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.
5. Blok basis data (*database block*), basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak yang disebut DBMS (*Database Management System*) untuk memanipulasinya.
6. Blok kendali (*control block*), beberapa pengendalian perlu diterapkan untuk mencegah kerusakan dari sistem itu sendiri.

Komponen-komponen di atas saling berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut berkaitan dengan masukan, proses dan produk. Komponen masukan merupakan langkah awal dalam penyusunan sebuah informasi. Komponen proses berkaitan dengan transformasi informasi,

sedangkan komponen produk berkaitan dengan hasil dan dampak dari sistem informasi itu sendiri.

Perlu kita pahami bahwa informasi yang baik harus memenuhi beberapa syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Parker (dalam Kumorotomo 2017:11) sebagai berikut:

1. Ketersediaan (*availability*)

Sudah barang tentu syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh (*accessible*) bagi orang yang hendak memanfaatkannya.

2. Mudah dipahami (*comprehensibility*)

Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen.

3. Relevan

Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

4. Bermanfaat

Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi, karena informasi tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan.

5. Tepat waktu

Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Syarat ini terutama sangat penting pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan-keputusan yang krusial.

6. Keandalan (*reliability*)

Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.

7. Akurat

Syarat ini mengharuskan informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Informasi harus jelas dan secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

8. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan.

### **II.1.3 Konsep Sistem Informasi Manajemen**

Organisasi dipacu untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap, dan akurat menjadi suatu informasi yang digunakan sesuai dengan keperluan organisasi itu sendiri. Dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen untuk mengolah dan mengelola informasi tersebut, penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi akan meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang dapat digunakan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis.

Menurut George M. Scott (2002:100), sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai

dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Menurut Chr. Jimmy L. Gaol (2008:14) berpendapat bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengelolaan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga dapat memberikan dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Sementara Wahyudi Kumorotomo (2017:13) mengemukakan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Gordon B. Davis (dalam Chr. Jimmy L Gaol 2008:15) mengemukakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan satu kesatuan, sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan serta sebuah basis data.

Menurut Mc. Leod (dalam Djahir 2014:115), sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang memberikan informasi, baik untuk kepentingan operasi atau kepentingan manajerial.

Komponen sistem informasi manajemen menurut Nicho (dalam Sudirman dkk 2020:21) merupakan semua elemen yang membuat sebuah sistem informasi. Dalam hal ini komponen sistem informasi manajemen terbagi menjadi dua yakni komponen sistem informasi manajemen fungsional dan komponen

sistem informasi manajemen fisik, berikut akan diuraikan mengenai kedua komponen tersebut.

#### 1. Komponen sistem informasi manajemen fungsional

Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen

Komponen sistem informasi manajemen fungsional menurut Nicho (dalam Sudirman dkk 2020:21), terdiri dari:

##### a. Sistem administrasi dan operasional

Komponen tersebut meliputi bagian-bagian manajemen yang dilakukan secara rutin yang prosedurnya telah ditentukan.

##### b. Sistem pelaporan manajemen

Sistem pelaporan manajemen merupakan komponen yang memiliki tugas dalam penyusunan sebuah laporan kinerja secara rutin

##### c. Sistem pencarian

Sistem pencarian merupakan komponen yang memberikan informasi ketika dibutuhkan akan senantiasa tersedia data maupun informasi tersebut yang akan digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan.

##### d. Sistem *database*

Sistem *database* merupakan komponen yang berguna dalam menyimpan semua data dan informasi terkait kegiatan dari organisasi tersebut. Dalam pendekatan *database*, potongan data disusun tentang entitas.

e. Data manajemen

Manajemen data merupakan komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data yang dimiliki merupakan data yang akurat, kekinian (*up to date*), aman, dan siap untuk digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara *database* dan komponen sistem informasi lainnya.

2. Komponen sistem informasi manajemen fisik

Komponen sistem informasi manajemen secara fisik merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar tetap bisa berjalan. Menurut Nicho (dalam Sudirman dkk 2020:23) bahwa komponen-komponen sistem informasi manajemen terdiri dari:

a. Perangkat keras (*Hardware*)

Perangkat keras merupakan salah satu komponen sistem informasi manajemen yang mutlak diperlukan. Perangkat keras dalam istilah komputer mengacu pada komponen fisik dan perangkat digital dengan bentuk fisik yang dapat terlihat secara nyata.

b. Perangkat lunak (*Software*)

Perangkat lunak merupakan serangkaian instruksi ke komputer atau perangkat digital lainnya untuk menjalankan setiap proses seperti menampilkan teks, memanipulasi angka secara matematis, atau menyalin dan menghapus sebuah dokumen.

c. *Database*

*Database* merupakan tempat menyimpan data dan informasi berupa *file* yang disimpan secara sistematis sehingga bisa dengan mudah untuk diakses oleh para penggunanya.

d. Prosedur pengoperasian

Prosedur merupakan komponen fisik berupa panduan dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Prosedur bisa berisi mengenai kebijakan metode yang akan dipakai, dan peraturan-peraturan dalam penggunaan sistem informasi manajemen

e. Personil (*Brainware*)

Personil merupakan komponen yang mengoperasikan semua komponen fisik yang telah disebutkan sebelumnya yakni mulai dari mengadakan *hardware*, menjalankan *software*, dan mematuhi prosedur. Personil tersebut biasa dikenal dengan operator, analisis sistem, programmer, staf dan lainnya.

f. Jaringan data

Jaringan data merupakan beberapa seperangkat *hardware* dan *software* dimana dengan adanya jaringan dapat memudahkan dalam bertukar maupun berbagai data dan informasi

Dari komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi manajemen antara komponen yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat sehingga dapat membantu dalam menghasilkan data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi.

Menurut Mc. Leod (dalam Djahir, 2014:119) Informasi manajemen haruslah berkualitas dimana informasi tersebut harus:

1. Relevan. Informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Tepat waktu. Informasi harus tersedia pada waktu yang diperlukan
3. Akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya

4. Lengkap. Informasi yang diberikan tidak boleh setengah-setengah dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan utama dari SIM adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan manajemen
- b. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan.
- c. Menyediakan informasi untuk mengambil keputusan.

Sistem informasi manajemen diharapkan akan menunjang tugas-tugas para pegawai di suatu organisasi, para manajer atau pengguna jasa organisasi. Dimana tidak hanya dalam pengambilan keputusan tetapi sangat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu subsistem dan *control society*.

#### **II.1.4 Konsep Administrasi Kependudukan**

Pada hakikatnya negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum agar setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dalam sistem administrasi kependudukan

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Perlindungan atas data pribadi
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Adapun yang menjadi kewajiban dari warga negara itu sendiri yakni berkewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sementara penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **II.1.5 Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

### **II.1.5.1 Pengertian SIAK**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi dan komunikasi menurut Fakrulloh (2016:2). Sistem ini disusun untuk manata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

### **II.1.5.2 Komponen penting dalam implementasi SIAK**

Menurut Fakrulloh (2016:18), Implementasi SIAK dilakukan melalui tiga komponen berikut:

1. Pendaftaran penduduk, merupakan sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini selanjutnya diterbitkan tiga dokumen, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga dan KTP-el.

2. Pencatatan sipil, merupakan sarana mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Peristiwa penting yang harus dilaporkan antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta pengangkatan anak, dan akta pengesahan anak.
3. Pengelolaan informasi kependudukan, dilakukan melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Oleh karena itu *output*-nya berupa informasi.

#### **II.1.5.3 Unsur-unsur SIAK**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

1. *Database*;
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
3. Sumber daya manusia;
4. Pemegang hak akses;
5. Lokasi *database*;
6. Pengelolaan *database*;
7. Pemeliharaan *database*;
8. Pengamanan *database*;
9. Pengawasan *database*;

10. Data cadangan;
11. Perangkat pendukung;
12. Tempat pelayanan;
13. Pusat data;
14. Pusat data cadangan; dan
15. Jaringan komunikasi data.

Dalam implementasinya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor induk kependudukan. Hal ini disebabkan, nomor tersebut bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan.

#### **II.1.5.4 Pengelolaan dan Tujuan SIAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelsakan bahwa pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya, diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIAK antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi pelaksana, petugas registrasi, dan unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana (UPT Instansi Pelaksana).

Adapun pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki beberapa tujuan sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa SIAK dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan SIAK antara lain sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Keberadaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" (BLT)/"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

## **II.2 Kerangka Pikir**

Dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Sistem ini diterapkan dengan tujuan menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui penerapan sistem ini diharapkan tercapai tertib administrasi kependudukan.

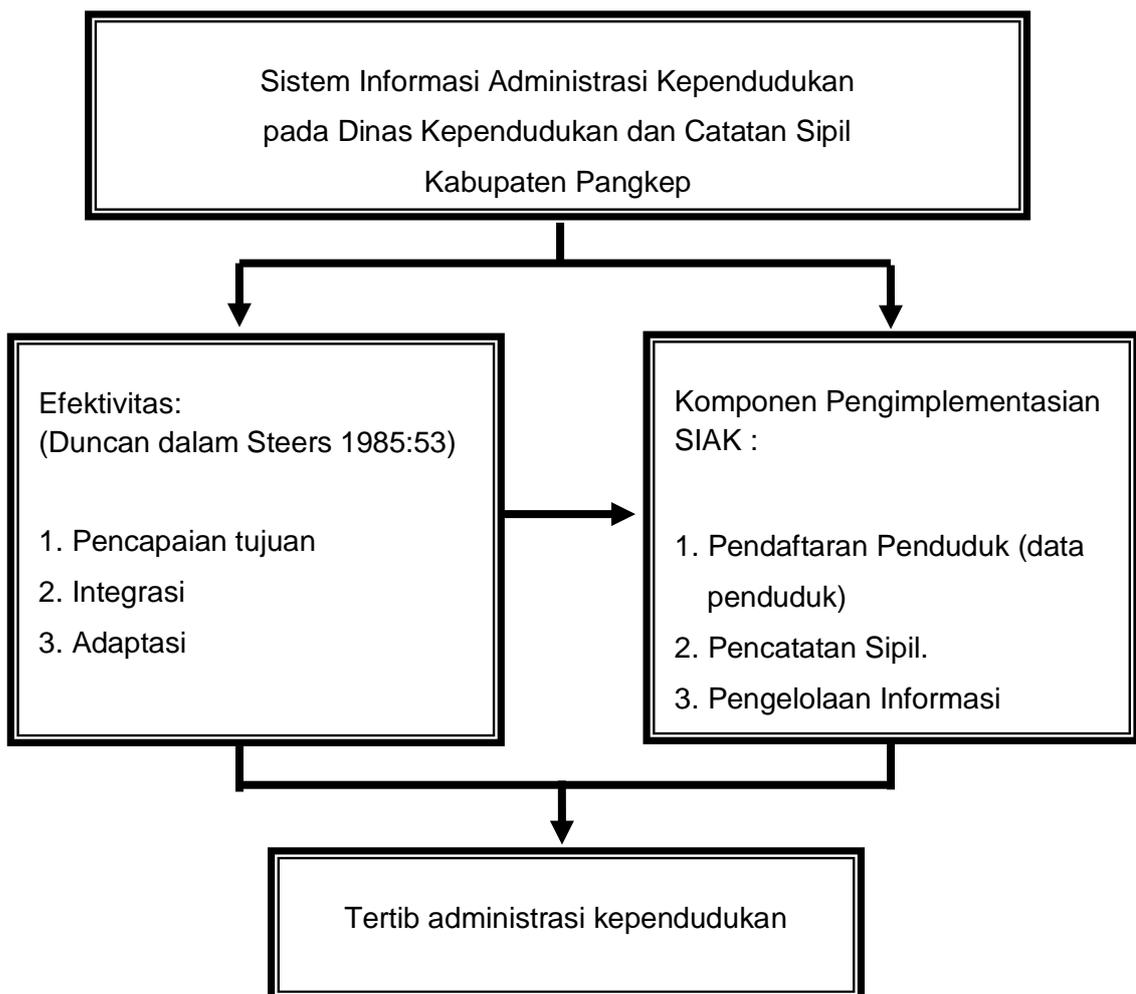
Efektivitas penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk melihat apakah penerapannya telah efektif atau belum dalam mengimplementasikan komponen dari SIAK sendiri yang terdiri dari pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. Hal tersebut akan berpengaruh pada tercapainya tertib administrasi kependudukan.

Untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka peneliti akan menggunakan teori dari Duncan (dalam Steers 1985:53) yang mengukur efektivitas dengan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Berikut ini akan ditunjukkan model kerangka pikir peneliti dalam melakukan penelitian.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



### II.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *hypo* = kurang dari, dan *thesis* = pendapat, sebagaimana dalam buku Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) oleh Taniredja 2011:24.

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. Hipotesis juga diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian (Ali, dalam Taniredja 2011:24). Hipotesis juga diartikan merupakan dugaan yang mungkin benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya (Hadi, dalam Taniredja 2011:24).

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ho** : Diduga penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep yakni efektif dengan persentase lebih rendah atau sama dengan 70% untuk masing-masing indikator.
- Ha** : Diduga penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep yakni efektif dengan persentase lebih tinggi dari 70% untuk masing-masing indikator.